

BAB II

GAMBARAN UMUM PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN

Gambaran secara umum mengenai Program Pengembangan Kecamatan (PPK) pada bab ini, meliputi sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan, program kerja, keorganisasian, fasilitas yang dimiliki dan sumber dana. Hal tersebut bertujuan untuk memahami PPK secara umum dalam lingkup nasional dan di Kecamatan Karanggede secara khususnya.

A. Sejarah Berdirinya Program Pengembangan Kecamatan

Upaya penanggulangan kemiskinan sejak lama telah dilakukan pemerintah. Berbagai program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dicanangkan guna memberikan dukungan dan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat yang memprihatinkan. Selama beberapa dekade silam, masyarakat hanya dijadikan sebagai obyek semata, yang pasif terhadap segala upaya perubahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pada program-program anti kemiskinan di masa lalu, masyarakat tidak memperoleh hak otonom, masyarakat dianggap obyek yang lemah dan tidak tahu apa-apa. Disisi lain, status quo melanggengkan rekayasa sosial pada tingkat birokrat. Sering aparat birokrat dianggap melakukan manipulasi tertentu, padahal hal itu belum tentu benar. Hal ini timbul di masyarakat, karena mereka tidak diberikan kepercayaan untuk ikut serta dalam berbagai rencana program yang diadakan pemerintah, unsur transparansi (keterbukaan) masih kurang. Kini, status quo dialihkan dengan berbagai perubahan, rekayasa

sosial digantikan dengan partisipasi dan tirani dengan demokrasi. Humanisasi telah timbul dengan adanya proses pembangkitan kesadaran kritis di masyarakat, khususnya melalui program yang terhitung baru dicanangkan oleh pemerintah yaitu Program Pengembangan Kecamatan. Sesuai yang dinyatakan oleh Bapak Sutiyono:

“Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program yang mengorbankan masyarakat, memberdayakan masyarakat hingga pada kelompok masyarakat terkecil. Pemerintah hanya sebagai stimulan bagi masyarakat, dengan jalan menyediakan dana dan memberikan kondisi bagi masyarakat untuk berkembang. Pemberdayaan terhadap masyarakat diantaranya dilakukan dengan cara melatih manajemen dan berupaya meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat. Program-program pengentasan kemiskinan sebelumnya, seperti IDT, P3DT dan sebagainya, disinyalir tidak tepat sasaran pada kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Sistem pelaksanaannya menggunakan aturan dari atas (top down), yaitu segala kebijakan pemerintah yang mengaturnya. Pemerintah berkewenangan menentukan program, pelaksanaan dan aturannya”¹

Program seperti halnya IDT, pada kenyataannya tidak mampu mengentaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan. Dana yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah pada umumnya tidak mampu menciptakan akumulasi modal. Dana yang diberikan tanpa disertai prinsip-prinsip pelestarian layaknya PPK. Pada umumnya yang memperoleh bantuan, ada yang baru memulai usaha tanpa bekal pengetahuan, dapat diambil contoh bidang peternakan. Pada waktu ternaknya terimbas penyakit dan peternak tidak bisa berbuat apa-apa, maka kebangkrutan yang akan dialaminya. Lain halnya dengan PPK, dalam programnya dapat disertai penyuluhan dan pelatihan-pelatihan jika diusulkan oleh pokmas (kelompok

¹ Hasil interview dengan Bapak Sutiyono, selaku Penanggungjawab Administrasi dalam PPK, pada tanggal 05 Februari 2005 di Kantor PJAK Kecamatan Karanggede.

masyarakat). Seperti kasus peternakan tersebut, maka dapat dilakukan kerjasama dengan Dinas Peternakan atau dengan pihak-pihak yang terkait.

Dalam hal menyangkut bidang ekonomi, ditetapkan 10% keuangan PPK pada akhir tahun kegiatan untuk dana pelatihan masyarakat dan pengembangan UPK. Dengan pembagian tersebut dimaksudkan, UPK diproyeksikan untuk melakukan pendampingan secara aktif kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.²

Dalam hal pelaksanaan program PPK, masyarakat berpartisipasi dalam hal pengawasannya, dari pihak masyarakat sendiri maupun dari unsur birokrat yang bertindak tidak sesuai dengan prosedur PPK. Hal tersebut sesuai yang dinyatakan oleh Bapak Widodo:

“Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan solusi terhadap kegagalan program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah dimasa lalu, seperti : IDT, P3DT, dan sebagainya. PPK meliputi aspirasi masyarakat, segala keputusan yang diambil harus melalui proses musyawarah, bahkan proses pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat sendiri”.³

Penanggulangan Kemiskinan dengan Program Pengembangan Kecamatan merupakan perwujudan nyata pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, program tersebut menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasionalnya. PPK fase pertama merupakan kelanjutan dari program IDT dan P3DT, telah dimulai sejak tahun anggaran 1998/1999 dan berakhir pada tahun 2001. Pada tahun

² Dokumen Laporan Bulan Maret, (PPK Kecamatan Karanggede, 2004), hlm.3.

³ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

2002 dimulai pelaksanaan PPK fase kedua. Pada prinsipnya tiap fase sama, namun pada fase kedua lebih mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan perluasan kegiatan masyarakat.⁴

PPK dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan. PPK merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan serta mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan. Pengembangan konsep PPK diarahkan pada penyelenggaraan pemerintah yang baik. Beberapa proses dan kegiatan yang dilaksanakan dalam PPK selalu mempertimbangkan agar dapat mendukung pencapaian pemerintah yang baik.⁵

B. Visi, Misi dan Tujuan

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan mempunyai visi, misi dan tujuan. Menurut Bapak Widodo, "Visi PPK adalah melakukan penyadaran dan pendampingan masyarakat dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat miskin dalam upaya pembangunan".⁶

⁴ Depdagri, *Petunjuk Teknis Operasional PPK*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002), hlm. 1.

⁵ *Ibid.*

⁶ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

Sedangkan misi PPK menurut Bapak Sutiyono, “Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat khususnya yang miskin, dengan memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggungjawab”.⁷

Secara umum tujuan PPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana, sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan khusus dari PPK adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengambilan keputusan pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian.
2. Meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan pembangunan.
3. Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal dalam pembangunan.
4. Mendorong pelembagaan sistem pembangunan partisipatoris.
5. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan dan atau kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁸

Dalam pencapaian tujuan umum dan khusus tersebut, pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) berpegang pada prinsip-prinsip.⁹

1. Keberpihakan kepada Orang Miskin

Orientasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil ditujukan bagi penduduk miskin. Keberpihakan ini

⁷ Hasil interview dengan Bapak Sutiyono, selaku Penanggungjawab Administrasi dalam PPK, pada tanggal 05 Februari 2005 di Kantor PJAK Kecamatan Karanggede.

⁸ Depdagri, *Op. Cit.*, hlm.2.

⁹ *Ibid.*, hlm. 2-3.

sangat penting mengingat penanggulangan kemiskinan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin merupakan tujuan utama dari PPK. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus selalu mempertimbangkan keberadaan kelompok orang miskin.

2. Transparansi

Pengelolaan seluruh kegiatan PPK harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan adalah kepercayaan dari para pelaku PPK bahwa transparansi akan sangat berpengaruh pada keberhasilan PPK. Transparansi ini harus bisa diwujudkan oleh semua pelaku PPK di semua tingkatan dan semua unsur. Transparansi (keterbukaan) bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam :

- a. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan PPK, misalnya menentukan jenis kegiatan dan mengelola dana PPK.
- b. Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut PPK.
- c. Menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- d. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPK.
- e. Meningkatkan saling percaya diantara sesama pelaku PPK.

3. Partisipasi

Pengertian partisipasi dalam PPK adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dan perempuan dalam setiap tahap

kegiatan PPK, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang alokasi dana PPK melalui musyawarah antar desa yang sebelumnya dibahas dalam musyawarah desa.

4. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola PPK secara mandiri dan partisipatif. Bentuk wewenang dan tanggungjawab masyarakat dalam PPK adalah :

- a. Memanfaatkan dan mengelola dana PPK.
- b. Memperoleh hak pendampingan.
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Mempertanggungjawabkan pengelolaan dana PPK.
- e. Memelihara dan melestarikan kegiatan yang telah dilaksanakan.

5. Kompetisi Sehat

Setiap pengambilan keputusan penting dalam PPK dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetensi secara sehat. Dengan prinsip kompetisi sehat, masyarakat berhak menentukan pilihannya sendiri berdasarkan hasil kajian atau telaahan terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan yang terbaik. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan untuk pengambilan keputusan dengan prinsip kompetisi sehat yaitu :

- a. Mengutamakan alternatif atau pilihan terbaik terhadap sesuatu yang diputuskan berdasarkan kebutuhan dan atau persoalan yang ada di masyarakat.
- b. Menghindari setiap upaya dominasi dari individu atau kelompok tertentu demi kepentingannya sendiri.
- c. Mengutamakan keterlibatan masyarakat pada musyawarah mufakat pada pembuatan keputusan.
- d. Unsur aparat dan konsultan hanya bertindak sebagai fasilitator dalam setiap pengambilan keputusan di masyarakat.

C. Program Kerja

Dalam rangka pencapaian tujuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tersebut, maka program kerja PPK disusun sesuai dengan hasil musyawarah antar desa, diantaranya meliputi bidang sebagai berikut :¹⁰

1. Kegiatan sarana prasarana

Perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

2. Kegiatan Ekonomi

Kegiatan ekonomi perempuan berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Prioritas anggotanya adalah kelompok

¹⁰ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

wanita, karena wanitalah yang menjadi inti pemberdayaan pada kegiatan ini. Lebih lanjut, Bapak Widodo mengatakan:

“SPP diberikan pada kelompok tanpa persyaratan memiliki bidang usaha ekonomi seperti halnya pada UEP. SPP sering diistilahkan Simpan Pinjam Khusus Wanita untuk memperhalus maknanya. SPP maupun UEP diberikan pada kelompok dengan sistem tanggung renteng yaitu kelompok harus bertanggungjawab jika ada yang tidak membayar hutangnya secara tepat waktu”.

3. Bidang Pendidikan

Bidang pendidikan, meliputi : pemberian beasiswa bagi keluarga tidak mampu, honor guru, maupun menyangkut Sumber Daya Manusianya (SDM).

4. Bidang kesehatan

Bidang Kesehatan, misalnya : perbaikan sarana dan prasarana bagi kesehatan masyarakat.

5. Training manajemen

Hal ini sangat diperlukan bagi para pelaku PPK, mengingat umur PPK khususnya di Kecamatan Karanggede masih sangat muda.

Ditinjau dari segi penggunaannya UEP dipergunakan untuk kepentingan produktif, sedangkan SPP berlaku untuk semua kepentingan sehingga dapat bersifat produktif maupun konsumtif. Konsumtif dalam hal ini tidak hanya diartikan untuk kepentingan sehari-hari, namun juga untuk kepentingan lain, tergantung peminjamnya karena tidak harus dari kelompok miskin. Namun prioritas tetap pada kelompok miskin terlebih dahulu. Setelah tidak ada kelompok masyarakat miskin yang mendaftar, barulah kemudian masyarakat nonmiskin bisa diikuti.

Menurut Bapak Sutyono, “Masyarakat cenderung mengusulkan kegiatan sarana dan prasarana”.¹¹ Lebih lanjut Bapak Setiyono mengatakan:

“Masyarakat bersikeras mengusulkan jalan, hal ini disebabkan kondisi jalan di pedesaan khususnya Kecamatan Karanggede tidak baik, bagi kelancaran kegiatan ekonomipun hal ini merupakan kendala. Pilihan pada kegiatan sarana dan prasarana harus melalui beberapa pertimbangan yang relevan, diantaranya : harus ada 50% swadaya dari masyarakat, sarana prasarana yang biasanya jalan, merupakan jalan utama yang banyak pemanfaatnya dan berguna bagi kelancaran kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Setelah jalan itu selesai dalam pengerjaannya, maka masyarakat berkewajiban atas segala pemeliharaannya dan bila terjadi kerusakan, masyarakat langsung memperbaikinya. Berkenaan dengan hal ini, maka di tingkat desa dibentuklah Tim Pemelihara yang melakukan pengawasan dalam rangka pemeliharaannya”.

Apabila pada usulan berikutnya masih sarana dan prasarana yang berupa jalan, maka usulan akan tetap dievaluasi dengan menilai kondisi jalan yang telah jadi, jika masyarakat bisa memelihara jalan itu dengan baik usulan akan dipertimbangkan oleh Tim Verifikasi. Tim Verifikasi berwenang menentukan usulan yang kemudian menjadi program kerja PPK.¹²

D. Organisasi

Organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi tersebut mengarah pada berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Berbagai faktor tersebut tidak dapat saling lepas, melainkan saling kait yang merupakan suatu kebulatan, maka dalam

¹¹ Hasil interview dengan Sutyono, selaku Penanggungjawab Administrasi dalam PPK, tanggal 05 Februari 2005 di kantor PJAK Kecamatan Karanggede.

¹² Hasil interview dengan Setiyono, selaku Fasilitator Kecamatan Teknik dalam PPK, pada tanggal 05 Februari 2005 di Kantor UPK Kecamatan Karanggede.

pengertian organisasi digunakan sebutan sistem yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu.¹³

Dalam menjalankan PPK dibutuhkan susunan kepengurusan untuk menggerakkan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan khususnya pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan. Selain hal tersebut, susunan kepengurusan juga dimaksudkan agar pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dapat merata pada semua pihak yang terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, Bapak Widodo mengungkapkan, "PPK sebenarnya bukanlah organisasi, bank, ataupun lembaga, hal ini masih dirundingkan oleh pihak yang berkepentingan dalam program tersebut, dalam hal ini adalah pemerintah (Depdagri)".¹⁴

Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa pelaku Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan diprioritaskan masyarakat Kecamatan setempat, kecuali Camat, Fasilitator Kecamatan PJOK dan PJAK. Dalam Program Pengembangan Kecamatan, Camat berfungsi sebagai pembina pelaksanaan PPK oleh desa-desa di wilayah kecamatan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Widodo:

"Fasilitator Kecamatan bertindak sebagai konsultan di wilayah kecamatan, dipilih oleh Pimpro (Pimpinan Program) PPK di tingkat pusat dengan sistem kontrak. Masa kerjanya juga ditentukan dari Pimpro pusat, hal ini dengan mempertimbangkan kualitas kerjanya, apabila menunjukkan kualitas yang baik maka dapat dipilih kembali

¹³ Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), hlm. 40.

¹⁴ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

pada periode berikutnya. FK terdiri dari dua orang yang berlatar belakang teknik sipil dan non teknik.¹⁵

Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) adalah seorang Kasi pemberdayaan masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di Kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan kegiatan PPK di Kecamatan. Sedangkan penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK) adalah seorang aparat di Kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan administrasi Kecamatan.¹⁶

Fungsi dan peran UPK adalah sebagai unit pengelola dan operasional pelaksanaan kegiatan PPK di tingkat antar desa termasuk mengkoordinasi pertemuan-pertemuan di Kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berdasarkan hasil musyawarah desa dan selanjutnya dipilih dalam musyawarah antar desa. Selain UPK, pelaku PPK lainnya Pendamping Lokal (Penlok) adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu FK untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap Kecamatan akan ditempatkan satu orang pendamping lokal.¹⁷ Berikut

¹⁵ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Pemberdayaan ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 2005 di kecamatan Karanggede.

¹⁶ Depdagri, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁷ *Ibid.*

ini hasil wawancara susunan kepengurusan PPK periode 2004/2005, dengan Mbak Suhartiningsih.¹⁸

Pembina	: Mardi Hardoyo, S.Sos, M.M.
FK Pemberdayaan Ekonomi	: Drs. Widodo
FK Teknik	: Ir. Setiyono
PJOK	: Subagyo
PJAK	: Sutiyono
Ketua UPK	: Adde Currie Siregar, ST.
Sekretaris UPK	: Siti Supriatun, SH.
Bendahara UPK	: Suhartiningsih
Pendamping Lokal	: Wahyu Widiatmo, A.Md.

E. Fasilitas Yang Dimiliki

Fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan oleh para pelaku PPK di Kecamatan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan sarana atau fasilitas yang memadai, segala kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun sarana atau fasilitas yang dimiliki khususnya UPK, sewaktu penulis mengadakan penelitian diklasifikasikan menjadi dua bagian

1. Fasilitas Pergedungan

Sesuai yang diungkapkan Bapak Widodo: “Untuk gedung perkantoran, UPK menempati salah satu ruangan di Kantor Kecamatan Karanggede,

¹⁸ Hasil interview dengan Mbak Suhartiningsih, selaku Bendahara UPK dalam PPK, pada tanggal 05 Februari 2005 di Kantor UPK Kecamatan Karanggede.

dengan memakai sistem kontrak serta pendanaan operasional lainnya seperti : listrik, telepon, dan sebagainya. Dana operasional PPK hanya 10% saja, sehingga hal ini mengakibatkan minimnya alokasi untuk kepentingan operasional PPK”.¹⁹

2. Non Pergedungan

a. Komputer	1 Unit
b. Meja	4 Buah
c. Kursi	6 Buah
d. Almari	1 Buah
e. Kipas angin	1 Buah
f. HP	1 Buah
g. Kalkulator	1 Buah
h. Deteksi uang	1 Buah
i. Whiteboard	2 Buah

Dengan melihat sarana dan prasarana yang dimiliki UPK, maka penulis menganggap bahwa UPK masih membutuhkan sarana dan prasarana demi kelancaran kegiatan yang telah direncanakan, seperti : ruang rapat, ruang pertemuan, ruang tamu dan sebagainya. Namun mengingat dana operasional PPK yang minim, untuk sementara ini bisa dikatakan cukup walaupun masih dalam keadaan yang terbatas. Sekalipun sarana atau fasilitas yang dimiliki sangat terbatas, UPK khususnya dan pelaku PPK pada umumnya, tetap berjuang untuk melakukan aktivitas-aktivitas demi memperjuangkan hak-hak

¹⁹ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku fasilitator pemberdayaan ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 februari 2005 di Kecamatan karanggede.

masyarakat miskin dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

F. Sumber Dana

Dana dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan kunci bagi keberlangsungan kegiatan atau pelaksanaannya, sehingga dana tersebut merupakan syarat yang sangat penting, karena tanpa adanya dana untuk pelaksanaan program tidak bisa dijalankan dan terealisasi. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui PPK yang perlu dibenahi dalam masyarakat khususnya diprioritaskan pada bidang ekonomi. Sektor ekonomi hingga saat ini, masih menjadi sorotan bagi pemerintah yang ingin mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui PPK yang didalamnya memberikan bantuan dana sekaligus berusaha mengembangkan masyarakat dengan prinsip pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Subagyo mengatakan: “Dana program tersebut berasal dari pemerintah yang diberikan pada masyarakat sebagai wujud bantuan pemerintah kepada kecamatan miskin dengan menciptakan akumulasi modal”.²⁰ Lebih lanjut Bapak Widodo mengemukakan:

“Sumber dana pemerintah untuk program tersebut berasal dari pinjaman Bank Dunia (IMF), hutang bagi pemerintah namun hibah bagi rakyat.

²⁰ Hasil interview dengan Bapak Subagyo, selaku Penanggungjawab Operasional dalam PPK, pada tanggal 05 Februari 2005 di Kantor Kecamatan Karanggede.

Bertolak dari hal tersebut, merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk berdaya. Sejalan dengan berlangsungnya PPK pada tiap pentahapannya, akan menciptakan akumulasi modal yang cukup besar dan menjadi dana abadi bagi proses pembangunan di kecamatan, apabila dikelola dengan baik dan bertanggungjawab, baik oleh pelaku-pelaku PPK maupun masyarakatnya sendiri”.²¹

Sesuai tekad Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk menanggulangi kemiskinan, banyak program dan kegiatan yang dilaksanakan, hal tersebut dengan melibatkan seluruh Dinas dan Instansi terkait. Sehubungan dengan hal ini, Bapak Fauzan mengatakan: “Program tersebut diantaranya Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan sejuta bebek, gaduhan ternak sapi, Bantuan Modal Usaha, Pemugaran Perumahan perdesaan, termasuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di kecamatan-kecamatan miskin”.²²

Kecamatan miskin tersebut mendapatkan dana dari Bantuan Pusat (Full grant) maupun melalui dana APBD Kabupaten Boyolali (Matching grant), sedangkan seharusnya untuk alokasi PPK sebesar 9 Milyard.²³ Menurut Mbak Adde Currie Siregar, “Mengenai dana bagi pelaksanaan PPK khususnya di Kecamatan Karanggede pada tahap II tahun 2005 ini, PPK memperoleh dana Rp. 750.000.000,- dari Pemerintah”.²⁴

Dana yang masuk di UPK Kecamatan, rincian pengelolaan dan pengalokasiannya selama ini terdokumentasikan dengan rapi dan cermat. Dengan demikian, dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang pengalokasian

²¹ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

²² Hasil interview dengan Bapak Fauzan AR, selaku Sekretaris Camat Karanggede, pada tanggal 17 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

²³ Dokumen Sambutan Bupati Boyolali dalam Lokakarya Evaluasi Pelaksanaan PPK Tahap II Tahun 2003.

²⁴ Hasil interview dengan Mbak Adde Currie Siregar, selaku Ketua UPK dalam PPK, pada tanggal 05 Februari 2005 di Kantor UPK Kecamatan Karanggede.

dana pada masing-masing kegiatan PPK. Pelaporannya disampaikan tiap akhir bulan dalam wujud Laporan Bulanan.

Proses penyaluran dana PPK dibagi ke dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah pencairan dana dari KPKN ke rekening kolektif desa di tingkat Kecamatan. Tahap kedua setelah dana diterima di rekening kolektif kecamatan, selanjutnya UPK berdasarkan rencana penyaluran dan pengajuan desa, menyalurkan dana PPK langsung ke desa melalui TPK.²⁵ Pengelolaan dana di Kecamatan dikoordinasikan oleh UPK. Setelah dana yang dipinjamkan untuk kegiatan ekonomi dikembalikan ke UPK, dana pengembalian ini harus digulirkan.

Dana yang digulirkan pada kelompok, harus didahului dengan pengajuan kegiatan (RPD) yang akan dilakukan pada kegiatan sarana prasarana maupun kegiatan yang sudah dilakukan pada UEP. Proposal harus disetujui Kepala Desa dan diketahui oleh FK (Fasilitator Kecamatan) dan PjOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan), serta harus ada SPPB (Surat Perjanjian Pemberian Bantuan).²⁶

Dana PPK untuk kegiatan ekonomi diberikan pada kelompok wanita dengan kriteria tidak mampu, kelompok peminjam memiliki keterkaitan perkumpulan atau organisasi tertentu yang telah berjalan minimal 1 tahun. Selanjutnya kelompok tersebut memiliki kepengurusan daaan berbagai catatan pembukuan. Menurut pernyataan Ibu Wiwik Widiastuti, "Dana digulirkan melalui kelompok pengajian, hal ini khususnya terjadi di Dusun surowangsan.

²⁵ Depdagri, *UPK, Penyaluran Dana Dan Administrasi Kegiatan PPK*, (Jakarta: Tim Koordinasi, 2002), hlm. 3.

²⁶ *Ibid.*

Sedangkan di tingkat Kelurahan, dana diberikan pada kelompok arisan ibu-ibu PKK”.²⁷

Berdasarkan pemaparan dan operasionalnya di lapangan, pemahaman bahwa dengan adanya dana perguliran PPK, para ibu-ibu yang mengikuti kegiatan arisan maupun pengajian semakin aktif mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan hal tersebut, maka akan makin memperluas wawasan pengetahuan tentang PPK dan makin meningkat pula kehidupan keagamaannya pada kegiatan pengajian. Secara tidak langsung dalam kegiatan keagamaan, PPK akan mampu memberikan stimulan bagi masyarakat melalui dana yang digulirkan.

²⁷ Interview dengan Ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordinator Ekonomi Desa Manyaran, pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.



BAB III

PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF WANITA DI KECAMATAN KARANGGEDE

Pemberdayaan ekonomi khusus bagi wanita dalam Program Pengembangan Kecamatan dilakukan melalui Usaha Ekonomi Produktif dan Simpan Pinjam Khusus Perempuan. Pemberdayaan dalam bab ini, meliputi berbagai pembahasan mengenai problematika ekonomi yang dihadapi wanita yang mengemukakan kondisi sosial ekonomi yang umumnya terjadi pada wanita, khususnya di Kecamatan Karanggede. Di masa lampau asumsi gender membedakan antara pria dan wanita, wanita dianggap makhluk kedua setelah pria. Demikian halnya dengan aktivitas perekonomiannya. Apabila wanita bekerja, meski kedudukannya sama kadang upah akan lebih tinggi bagi pria.

Pada sub judul berikutnya, mengenai pelaksanaan pemberdayaan ekonomi khusus bagi wanita. Hal tersebut meliputi berbagai kebijakan yang diberlakukan dalam Program Pengembangan Kecamatan yang dapat berupa peraturan-peraturan, ketentuan maupun berbagai keputusan yang berkenaan dengan program tersebut, baik yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk kelancaran pelaksanaan program. Upaya peningkatan sumber daya wanita, dilakukan dengan cara mengikutsertakan partisipasi wanita dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program, serta melalui kegiatan ekonomi yang dilakukan wanita melalui program tersebut. Selanjutnya, akan dikemukakan berbagai respon masyarakat terhadap Program Pengembangan Kecamatan dalam upaya pemberdayaan ekonomi bagi wanita, respon masyarakat

tersebut terdiri dari respon pihak-pihak yang terkait dalam program dan masyarakat yang mengikuti program.

A. Problematika Ekonomi Wanita

Stereotype wanita telah melekat sejak lama dalam budaya masyarakat Indonesia. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya yaitu pada bab pertama, stereotype tersebut berawal dari proses budaya. Budaya telah menempatkan posisi wanita pada kedudukan yang lemah, karena itulah kadang dalam diri wanita timbul rasa kurang percaya diri. Adanya bias gender juga menyebabkan minimnya akses kesempatan kerja bagi wanita.

Kultur dan stereotype¹ wanitapun perlu dilakukan klarifikasi. Berkenaan dengan hal ini, Bapak Widodo mengemukakan :

"Program Pengembangan Kecamatan yang menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan bertolak pada pola pikir bahwasanya perempuan memiliki potensi untuk dapat berkembang. Dengan adanya program tersebut akan mampu mengikis konsep budaya Jawa yang menganggap kerja perempuan hanya dalam lingkup dapur (memasak) dan kasur (melayani kebutuhan biologis suami)".²

Pemetaan wilayah kerja wanita dalam budaya jawa yang teridentikkan di dapur dan di kasur kemudian dirangkaikan dengan tugas wanita, yaitu macak (berhias), manak (melahirkan), dan masak (menyiapkan makanan bagi keluarga). Hal ini dalam istilah Jawa, kemudian timbul *kanca wingking* (teman belakang) untuk menyebut istri. Hal itu menunjukkan bahwa perempuan tempatnya bukan di depan sejajar dengan laki-laki, melainkan di

¹ Stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu, pada umumnya stereotype selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Dikutip dari Mansour Fakhri, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, *Loc. Cit.*

² Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

belakang dan hal ini juga menunjukkan sempitnya ruang gerak dan pemikiran perempuan, sehingga perempuan dianggap tidak memiliki cakrawala di luar tugas-tugas domestiknya.

Gambaran perempuan Jawa menurut cara pandang budaya Jawa, secara kodrati perempuan merupakan makhluk lemah jika dibandingkan dengan laki-laki sehingga perlu dilindungi oleh laki-laki. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan itulah yang kemudian menimbulkan efek dalam perbedaan relasi gender. Perbedaan inilah yang kemudian dianggap berpengaruh pada perkembangan emosional dan kapasitas intelektual antara keduanya. Dalam masyarakat Jawa khususnya, masih berkembang bahwasannya nasib perempuan sebagai istri tergantung pada suami, dalam ungkapan Jawa "swargo nunut neroko katut". Surga merupakan lambang kehidupan dunia maupun akhirat yang menunjukkan kebahagiaan. Sedangkan neraka merupakan lambang penderitaan. Dalam hal ini, kebahagiaan dan kesengsaraan perempuan sebagai istri tergantung pada kebahagiaan dan penderitaan seorang suami, sehingga perempuan seolah-olah tidak memiliki daya untuk menentukan nasibnya sendiri. Mengenai hal tersebut, Ibu Wiwik Widiastuti mengatakan, "Otoritas perempuan dalam Program Pengembangan Kecamatan memberikan akses terhadap kehidupan ekonominya, dengan berbagai asumsi gender yang berkembang keikutsertaan perempuan dalam program pemerintah ini, akan mampu meningkatkan kemitrasejajaran dengan kaum pria."³

³ Hasil interview dengan ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordinator Ekonomi Desa Manyaran, pada tanggal 16 februari 2005 di Dusun Surowangsan.

Dengan berbagai stereotype budaya Jawa yang berkembang khususnya di Kecamatan Karanggede, masih ada masyarakat yang memposisikan wanita sebagai sosok nomor dua setelah pria. Meskipun pemerintah gencar menggalakkan program bagi kelompok perempuan, namun jika masyarakatnya masih berpikir berpola pikir sempit maka tanpa dukungan dari semua lapisan masyarakat program tidak mampu berjalan. Stereotype pada diri wanita akan menghambat proses aktualisasi diri. Untuk mengubah stereotype yang ada, maka perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan situasi dan kondisi bagi perempuan untuk berkembang. Dengan prinsip bahwa pada dasarnya pria dan wanita diciptakan dalam kesetaraan dan memiliki hak yang sama.

Dalam era pembangunan sejak lama, sangat minim yang memberikan akses partisipasi wanita dalam pembangunan melalui upaya kebijakan, keberpihakan dan tindakan konstruktif yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Wiwik Widiastuti, "Wanita belum pernah mendapatkan prioritas dalam upaya pembangunan ekonomi berwawasan gender".⁴

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi wanita di Kecamatan Karanggede terletak pada tingkat pendidikan dan ketrampilan yang relatif

⁴ Hasil interview dengan Ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordinator Ekonomi Desa Manyaran, pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

minim, sehingga dengan kondisi tersebut kesempatan untuk mencari pengetahuan dan pengalaman sangat kurang. Pengetahuan yang minim menimbulkan ketidakberdayaan dan kebodohan. Selain hal tersebut, dari segi informasi sangat terbatas mengingat kondisi pedesaan yang relatif miskin. Informasi yang terbatas mengakibatkan kurangnya pengetahuan terhadap adanya peluang kerja maupun bisnis.

Meskipun belum ada data statistik tentang kehidupan ekonomi perempuan secara menyeluruh di Kecamatan Karanggede, akan tetapi kondisi ekonomi perempuan di Kecamatan Karanggede khususnya di pedesaan masih sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari rata-rata tingkat pendidikan mereka masih rendah begitu pula mengenai bakat ketrampilan yang mereka miliki. Hal inilah yang menjadikan akses ke pasar tenaga kerja sangat sulit. Pada umumnya, wanita di pedesaan kegiatan ekonominya berkisar pada pengrajin bambu, pedagang kecil-kecilan dan petani. Bagi para pengrajin, barang yang dihasilkan belum memiliki komoditi jual yang berkualitas tinggi, hal ini disebabkan karena masih kurangnya daya kreatifitas, peralatan yang memadai dan pangsa pasar yang enggan untuk dapat menerimanya. Lingkup pemasarannya pun masih di wilayah sekitarnya, jadi masih boleh dikatakan produk-produk yang dihasilkan hanya untuk kepentingan lokal.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi dalam kegiatan ekonominya, ada beberapa hal yang menjadi penyebab lemahnya ekonomi mereka, diantaranya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang lemah

Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan wanita bukan karena mereka tidak mampu dididik, tetapi lebih pada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang kurang. Potensi mereka masih bisa lebih dikembangkan dengan keberadaan pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peluang kerja sehingga dapat ikut menopang ekonomi keluarga. Pendidikan tidak mengenal batas dan waktu, siapapun bisa memperolehnya baik secara formal maupun nonformal. Begitupun juga akan kebutuhan pelatihan tidak pernah ada kata terlambat, selama seseorang masih memiliki keinginan yang kuat dari dalam dirinya, maka proses belajar dan pantang menyerah menjadi kunci suksesnya. Mengenai hal ini, ungkap salah seorang warga masyarakat sekaligus menjadi pokmas (kelompok masyarakat), Ibu Prihwanti mengatakan:

"Nak ono pelatihan aku yo gelem, opo maneh nak dianakke kanggo ningkatke produksi lan kualitas kerajinan pring, soalle saiki mung iso gawe anyaman besek, kuwi wae sebabe daripada nganggur ora ono gawean liyane".⁵

(Jika ada pelatihan saya juga mau, apalagi jika diadakan untuk meningkatkan produksi dan kualitas kerajinan bambu, karena sekarang hanya bisa membuat anyaman besek, itu disebabkan menganggur tidak ada pekerjaan lainnya).

Kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, dalam hal ini pelatihan dari Program Pengembangan Kecamatan relatif masih kecil, hal ini juga tidak terlepas dari beberapa kendala, diantaranya disebabkan dana

⁵ Hasil interview dengan Ibu Prihwanti, salah seorang Pokmas, pada tanggal 15 februari 2005 di Dusun Surawangsan.

operasional UPK yang sekaligus menjadi dana pelatihan masih sangat kecil yaitu hanya 10% saja.

Sejumlah 10% dari prosentase jasa pinjaman SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) digunakan untuk dana pelatihan masyarakat dan pengembangan UPK. Dengan pembagian tersebut dimaksudkan untuk melakukan pendampingan secara aktif kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan untuk mengurangi kemiskinan.⁶ Dalam hal ini, Bapak Widodo mengungkapkan:

"Dana operasional PPK hanya 10%, jumlah ini sangat minim bagi pelaksanaan operasional PPK dan untuk program pelatihan. Kantor PPK saja masih mengontrak dan adanya pembiayaan-pembiayaan lain berkenaan dengan fasilitas PPK".⁷

Menyangkut masalah musyawarah, kelompok wanita cenderung agak pasif pada awalnya, namun hal ini tidak menyurutkan mental kelompok wanita. Berdasarkan pernyataan Bapak Widodo, "Kelompok wanita akan lebih aktif dan reaktif di tingkat musyawarah desa".⁸

Dalam hal pengembangan diri, sebenarnya pada era sekarang dapat dilakukan dengan mengikuti kursus-kursus dan sejenisnya, namun terbentur kembali pada masalah ekonomi, sehingga hal ini kemudian menjadi terabaikan. Dengan keberadaan PPK akan mampu memberikan

⁶ Dokumen PPK Laporan Bulan Maret 2004, hlm. 4.

⁷ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

⁸ Hasil diskusi dengan Bapak Widodo disela-sela kegiatan pertemuan antar kelompok, pada tanggal 5 Februari 2005 di Desa Sempulur.

nafas baru dan harapan bagi masyarakat yang kritis terhadap diri dan pembangunan.

2. Prasarana Jalan

Kegiatan ekonomi produksi tidak terlepas dari upaya distribusi. Distribusi yang lancar diantaranya didukung oleh kondisi jalan yang memadai. Jika kondisi jalan rusak, maka masyarakat mengalami hambatan, timbulnya rasa enggan melewatinya dan kurangnya penghematan waktu sampai di tempat pemasaran. Berkaitan dengan hal ini Ibu Wiwik Widiastuti mengatakan, "Jika kondisi jalan baik, maka secara otomatis dapat memperlancar kegiatan ekonomi, pergi ke pasar tidak ada kendala karena jalan enak dilewati".⁹

Permasalahan kembali ke masalah dana, masyarakat tidak mampu berswadaya jalan. Dalam PPK, solusi terhadap permasalahan ini dapat teratasi dengan bantuan 50% dari PPK dan sisanya 50% dari warga masyarakat, yang menjadi kendala menurut Bapak Setiyono, "Masyarakat kurang adanya transparansi pelaksanaan kegiatan".¹⁰ Hal ini berakibat membengkaknya pembiayaan yang berdampak pula pada pendanaan PPK. Waktu pelaksanaannya juga tidak sesuai target, prasarana jalan misalnya di Desa Manyaran, seperti diungkapkan Ibu Wiwik Widiastuti:

"Kendala pelaksanaan rehabilitasi jalan diantaranya karena dilaksanakan dengan bulan puasa, bertepatan musim penghujan yang mengakibatkan kadang kegiatan terhenti dan hal ini juga

⁹ Hasil interview dengan Ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordinator Ekonomi Desa Manyaran, pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

¹⁰ Hasil interview dengan bapak Setiyono, selaku Fasilitator Kecamatan Teknik, pada tanggal 5 Februari 2005, di Kantor UPK Kecamatan Karanggede.

mengaibatkan cor-coran hilang, swadaya tenagapun sifatnya juga sukarela".¹¹

B. Langkah-langkah Pelaksanaan Pemberdayaan Ekonomi Wanita di Kecamatan Karanggede

Pemberdayaan merupakan langkah tepat untuk menanggulangi berbagai permasalahan publik yang menyangkut pembangunan. Konsep pemberdayaan yang berupaya menampilkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan, akan mendorong dan menumbuhkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sehingga kemudian akan meningkatkan harkat, martabat serta kepercayaan diri untuk dapat mengembangkannya.

Inti Pemberdayaan pada Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Karanggede adalah penguatan diri segi ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin dengan didukung dengan sarana dan prasarana yang menunjang bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kelancaran kegiatan ekonomi juga perlu didukung dengan adanya penciptaan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi masyarakat untuk berkembang. Hal ini dapat berupa bantuan yang berupa modal dan perbaikan kondisi jalan yang mendukung bagi kelancaran transportasi. Hal tersebut hanya merupakan sebagian diantara sekian banyak Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Karanggede yang selama ini mulai direalisasikan. Proses pelaksanaan penentuannya tentu saja harus sesuai dengan kriteria aturan program yang telah ditentukan.

¹¹ Hasil interview dengan Ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordinator Ekonomi Desa manyaran, pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

Berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam program PPK (Program Pengembangan Kecamatan) ada dua jenis bantuan modal yaitu berupa UEP (Usaha Ekonomi Produktif) khusus diberikan bagi masyarakat miskin yang memiliki bidang usaha produktif dan berupa simpan pinjam yang diberikan pada masyarakat untuk keperluan beragam (produktif maupun konsumtif). Kedua jenis bantuan modal tersebut diprioritaskan pada kelompok wanita yang selama ini dianggap termarginalkan dari segala upaya proses pembangunan. Hal ini sebagai langkah nyata pemerintah dalam rangka menegakkan konstitusi hukum yang tertuang dalam hukum negara, bahwasannya semua warga negara memiliki hak yang sama.

Berkenaan dengan kegiatan ekonomi melalui UEP maupun dalam bentuk simpan pinjam, Bapak Sutiyono mengemukakan, "Pemberdayaan melalui Usaha Ekonomi Produktif bagi wanita ditujukan untuk melatih manajemen, meningkatkan hasil produktifitas dan meningkatkan taraf kehidupannya".¹²

Lapangan pekerjaan semakin sempit dan sulit untuk didapatkan khususnya bagi kelompok perempuan. Banyak faktor yang menyebabkan wanita sulit mendapatkan pekerjaan. Selain adanya prasangka negatif, juga karena potensi atau skill yang dimiliki wanita belum memadai. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang kurang optimal. Dalam hal tersebut Bapak Widodo menyatakan:

¹² Hasil interview dengan Bapak Sutiyono, selaku Penanggungjawab Administrasi Kecamatan dalam PPK, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor PJAK Kecamatan Karanggede.

"Wanita sebenarnya memiliki potensi akan tetapi kadang mereka kurang jeli terhadap kebutuhannya sendiri, sehingga dengan adanya PPK ini diharapkan kelompok wanita mampu berfikir dan berkembang".¹³

Dalam kesempatan yang lain Bapak Widodo menjelaskan:

"Para Ibu hendaknya mampu mencari solusi terhadap permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi dan terjadi baik saat sekarang maupun kelak di kemudian hari serta ikut memikirkan rekan-rekan yang belum memiliki usaha ekonomi".¹⁴

Berpangkal dengan berbagai persoalan yang dihadapi wanita dalam kegiatan ekonomi dan melihat pada kondisi ekonomi masyarakat pada umumnya, maka lahirlah pemberdayaan masyarakat miskin oleh pemerintah sebagai wujud nyata kepeduliannya terhadap kondisi masyarakat yang masih memprihatinkan. Bukan hanya di wilayah Kecamatan Karanggede, namun juga diberbagai kecamatan yang sebagian besar masyarakatnya masih tergolong miskin.

Sebelum melakukan upaya pemberdayaan ekonomi dan kegiatan lain, PPK Kecamatan Karanggede yang masih terhitung muda perlu melakukan manajemen program melalui pelatihan agar keberlangsungannya berjalan lancar. PPK yang merupakan program pemerintah yang diantaranya bertujuan menciptakan peran aktif masyarakat juga terciptanya transparansi birokrasi, dalam pelaksanaan program yang menjadi prioritas adalah warga masyarakat yang berada pada lingkup kecamatan setempat. Hal ini dalam

¹³ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

¹⁴ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

rangka mengoptimalkan SDM dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat setempat yang telah mengetahui seluk beluk kecamatan tempat tinggalnya.

Berkenaan dengan hal tersebut Bapak Widodo mengungkapkan :

"Pelaksana Program PPK merupakan anggota masyarakat sedangkan yang melakukan manajemen pengelolaan PPK juga dari anggota masyarakat sendiri, namun dengan diadakan penyeleksian terlebih dahulu , seperti UPK (Unit Pengelola Kegiatan), PL (Pendamping Lapangan), FD (Fasilitator Desa) dan KE (Koordinator Ekonomi). Mengenai kedudukan FD dan KE, FD merupakan tangan panjang FK di tingkat desa sedangkan KE merupakan tangan panjang UPK di tingkat desa pula".¹⁵

Pada awal pelaksanaan program, terlebih dahulu diadakan sosialisasi dan pembentukan kelompok pada kelompok wanita sebagai syarat diturunkannya dana UEP bagi kelompok wanita. Mengenai hal ini, Ibu Wiwik Widiastuti menjelaskan:

"Kelompok peminjam yang biasanya berjumlah 5-10 orang atau lebih biasanya disyaratkan memiliki kepengurusan, buku catatan keorganisasian atau kelompok-kelompok pengajian yang minimal telah berjalan satu tahun".¹⁶

Memasuki tahap awal program PPK adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi pada akhir periode. Berkaitan dengan upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam PPK ada beberapa ketentuan wajib yang harus dipenuhi agar mencakup aspirasi perempuan juga untuk meningkatkan perannya dalam upaya pembangunan serta peningkatan harkat dan martabatnya.

¹⁵ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

¹⁶ Hasil interview dengan ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordinator Ekonomi Desa Manyaran, pada tanggal 16 februari 2005 di Dusun Surowangsan.

1. Kebijakan Program Pengembangan Kecamatan

A. Pelatihan Pelaku PPK

Pelatihan merupakan bagian tak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan PPK. Pada setiap tahapan pelaksanaan PPK akan terjadi proses transfer pengetahuan dan ketrampilan antar pelaku program maupun pelaku program dengan masyarakat, sehingga terjadi proses pembelajaran. Pendekatan pelatihan bagi pelaku PPK menggunakan pola pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan metode partisipatif. Untuk meningkatkan kualitas pelaku PPK, ada dua jenis strategi pelatihan yang digunakan yaitu:¹⁷

a. Pelatihan Praturgas

Para pelaku PPK di masyarakat, seperti : FD (Fasilitator Desa), TPK (Tim Pengelola Kegiatan), TPU (Tim Penulis Usulan), PL (Pendamping Lokal), TV (Tim Verifikasi) dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sebelum menjalankan tugasnya akan mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan kepada mereka ini lebih banyak akan dipandu dan diberikan oleh FK (Fasilitator Kecamatan) dan KM Kab (Konsultan Manajemen Kabupaten). Dengan demikian FK dan KM Kab harus memiliki kompetensi atau pengetahuan dan keterampilan sebagai seorang pelatih.

¹⁷ Depdagri, *Pedoman Fasilitasi dan Pelatihan Program Pengembangan Kecamatan*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002), hlm. 7.

b. Pelatihan Lanjutan

Sebagai bentuk pendampingan dan dukungan teknis di lapangan, fasilitator dan konsultan perlu memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangannya kepada pelaku PPK di masyarakat. Tambahan pengetahuan dan keterampilan ini dapat diberikan melalui pelatihan lanjutan atau sering disebut dengan *on the job training*. Pelatihan lanjutan diberikan kepada pelaku PPK pada saat menjalankan tugas-tugasnya. Pelatihan ini dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dengan waktu dan materi yang sangat bervariasi untuk setiap pelaku PPK. Dengan demikian dituntut bagi FK dan Konsultan dapat memperkirakan kebutuhan materi apa yang perlu disampaikan dalam pelatihan lanjutan kepada para pelaku PPK di masyarakat.

Kegiatan pelatihan sangat penting dilakukan guna terciptanya kelancaran pelaksanaan program. Seperti halnya pelatihan pada UPK dilatar belakangi dengan problem belum adanya persepsi yang sama antar UPK yang ada tentang sistem pembukuan dan administrasi yang baku dan standar meski telah menerima buku panduan.¹⁸ Berhubungan dengan hal ini Bapak Widodo mengungkapkan:

¹⁸ Dokumen Laporan PPK Kecamatan Karanggede Bulan Januari 2004, (Karanggede: PPK Kecamatan Karanggede, 2004), hlm. 3.

"Kegiatan Pelatihan sangat penting bagi para pelaku PPK sebagai sarana menambah dan memperdalam pengetahuan mengenai PPK agar mampu melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berupa pendampingan komunitas".¹⁹

Secara umum pelaku proses fasilitasi disebut fasilitator. Dalam PPK, FK, KM dan aparat berperan sebagai fasilitator dari luar masyarakat, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai pendamping sedangkan pendamping lokal, FD serta seluruh pelaku kegiatan yang berasal dari masyarakat setempat juga berperan sebagai fasilitator yang dipahami sebagai Kader Pemberdayaan. Sebagai pendamping masyarakat, pada waktu tertentu harus siap mundur dari perannya dan memandirikan para Kader Pemberdayaan.²⁰

Menurut Ibu Mumpuni, salah seorang Fasilitator Desa Manyaran mengemukakan:

"Kegiatan Pelatihan FD yang hanya dilakukan dua hari, belum dapat memahami seluruh kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas sebagai FD, sehingga harus diimbangi dengan proses belajar sendiri baik dari buku panduan operasional maupun pengalaman di lapangan nanti".²¹

B. Pelatihan Untuk Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Pelatihan ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi dan ketrampilan tertentu dari anggota masyarakat sebagai alat memenuhi

¹⁹ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

²⁰ Depdagri, *Op.Cit.*, hal. 1

²¹ Hasil interview dengan Ibu Mumpuni selaku FD Desa Manyaran, pada tanggal 15 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidupnya. Materi pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang perlu dikembangkan baik di bidang ekonomi, kesehatan, ketrampilan, dan lain-lain. Peserta pelatihan adalah anggota masyarakat desa yang tergolong miskin tetapi memiliki potensi atau dasar ketrampilan tertentu yang dapat dikembangkan, tempat dan waktunya menyesuaikan dengan kondisi dan dan kebutuhan masyarakat. Fasilitator Kecamatan memfasilitasi proses pelatihan ini dengan mencarikan narasumber atau pelatih yang benar-benar dipandang ahli dan berpengalaman di bidang yang dilatihkan. Kegiatan ini dapat merupakan bagian dari usulan kegiatan masyarakat jika memang dibutuhkan. Selain itu dapat juga dibiayai melalui dana operasional kegiatan atau sumber-sumber lain jika dipandang sangat perlu oleh masyarakat dan ada kemungkinan dikembangkan.

Penyelenggaraan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat terutama yang di luar usulan kegiatan masyarakat, dilakukan oleh UPK yang dikoordinasikan dengan FK dan PJOK. Sedangkan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat yang merupakan usulan kegiatan yang disetujui dengan MAD (Musyawarah Antar Desa), dikelola oleh TPK. Berkaitan dengan pelatihan untuk pengembangan kapasitas masyarakat tersebut Bapak Sutiyono mengatakan, "Kegiatan pelatihan

dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat jika memang diperlukan".²²

C. Sosialisasi

Sosialisasi dalam PPK adalah upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai PPK kepada masyarakat sebagai penerima program, maupun kelompok masyarakat lainnya serta kepada para pelaku dan instansi atau lembaga pendukung PPK disemua tingkatan.²³ Menurut Bapak Subagyo, "Kegiatan sosialisasi dalam masyarakat dilakukan secara langsung, yaitu dengan cara tim pelaku PPK terjun langsung ke lapangan untuk memberikan penjelasan mengenai PPK".²⁴ Hal serupa dikemukakan oleh Bapak Setiyono, "Sosialisasi ditingkat Desa dilakukan oleh FD (Fasilitator Desa) yang dibantu konsultan dan Fasilitator Kecamatan, hal ini dilakukan dalam forum musyawarah di tingkat Dusun maupun ditingkat Desa".²⁵

Pada dasarnya proses sosialisasi PPK dilakukan melalui dua cara, yaitu pertemuan langsung dan media informasi. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pertemuan Langsung

Sosialisasi PPK melalui pertemuan langsung dilakukan dengan menggunakan pertemuan formal yang sengaja dibuat dalam rangka

²² Hasil interview dengan Bapak Setiyono, selaku PJAK PPK Kecamatan Karanggede, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor PJAK Kecamatan Karanggede.

²³ Depdagri, *Penjelasan I: Sosialisasi*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002), hlm. 1.

²⁴ Hasil interview dengan Bapak Subagyo, selaku PJOK dalam PPK, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor PJOK Kecamatan Karanggede.

²⁵ Hasil interview dengan Bapak Setiyono, selaku Fasilitator Kecamatan Teknik dalam PPK, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor UPK Kecamatan Karanggede.

pelaksanaan PPK maupun informal yaitu menggunakan pertemuan yang sebelumnya memang sudah ada. Pertemuan sosialisasi yang memang sengaja diadakan dalam rangka PPK adalah sebagai berikut:²⁶

1. Pertemuan sosialisasi PPK di Propinsi.
2. Pertemuan sosialisasi PPK di Kabupaten.
3. Sosialisasi di Kecamatan melalui Musyawarah Antar Desa I.
4. Sosialisasi di Desa melalui Musdes I.
5. Sosialisasi di Dusun dan kelompok masyarakat sekaligus sebagai metode atau media penggalan gagasan dari masyarakat.

Dalam sosialisasi langsung di tingkat masyarakat (Dusun dan kelompok) hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ²⁷:

- a. Menggunakan pertemuan-pertemuan formal maupun informal yang telah ada di masyarakat.
- b. Memanfaatkan setiap kesempatan ketika bertemu dengan sekumpulan masyarakat : di pos ronda, lapangan olahraga, tempat pengajian, atau tempat berkumpul lainnya untuk menyebar luaskan PPK secara informal.
- c. Undangan pertemuan dengan masyarakat menggunakan cara-cara yang lazim digunakan (seperti: menggunakan kentongan, diumumkan melalui masjid, atau media lainnya). Bila menggunakan undangan tertulis, usahakan undangan tersebut juga di tempel di papan-papan informasi sehingga setiap orang merasa berhak juga untuk hadir.
- d. Tidak boleh melakukan pertemuan sosialisasi hanya dengan kelompok dari kalangan tertentu saja atau sengaja tidak melakukan sosialisasi pada kelompok tertentu.
- e. Menggunakan bahasa yang sederhana dan dimengerti masyarakat.
- f. Informasi PPK tidak sekedar disampaikan begitu saja, tetapi perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

²⁶ Depdagri, *penjelasan I: Sosialisasi, Loc. Cit.*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

informasi tersebut. Misalnya tentang negative list mengapa hal tersebut dilarang dalam PPK, mengapa proses atau tahapannya sering dirasakan cukup panjang, mengapa ada dana yang sifatnya hibah dan ada yang pinjaman dan harus dikembalikan, mengapa harus ada kompetisi dan tidak dibagi rata saja, dll.

- g. Dalam penyampaian informasi kepada masyarakat menggunakan simbol-simbol atau pepatah yang ada di masyarakat sehingga mudah untuk diingat.
- h. Masyarakat pada dasarnya akan tertarik, menerima informasi suatu program yang datang dari luar dan akan mau berperan serta untuk memberikan kontribusinya jika mereka merasakan ada manfaat yang dapat diambil. Untuk itu perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa PPK merupakan salah satu jembatan bagi masyarakat desa dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Meyakinkan kepada masyarakat bahwa PPK benar-benar telah dijalankan selama lebih dari 3 (tiga) tahun di beberapa tempat di Indonesia dan bukan cerita bohong belaka (hal ini dengan cara memberikan contoh lokasi terdekat yang pernah melaksanakan PPK).

b. Media Informasi

Selain melalui pertemuan langsung dengan masyarakat, sosialisasi dan penyebarluasan informasi PPK dapat dilakukan melalui media-media informasi. Media informasi yang berkembang di masyarakat dapat digunakan sebagai sarana penyebarluasan informasi, baik tradisional maupun modern. Beberapa media informasi yang dapat digunakan antara lain :²⁸

- a. Tokoh-tokoh masyarakat (agama, adat) yang ada di lokasi program

Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di pedesaan seringkali merupakan tokoh panutan yang dipercaya dalam ucapan maupun tindakannya, karena itu keberadaan tokoh-tokoh tersebut merupakan alternatif sebagai media sosialisasi atau penyebarluasan informasi PPK. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: kunjungi mereka, perkenalkan diri, sampaikan informasi tentang PPK (latarbelakang, tujuan, sasaran), minta

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

ijin akan bertemu dengan masyarakat untuk mensosialisasikan PPK. Jika hubungan terjalin dengan baik ajukan permohonan agar tokoh tersebut membantu menyampaikan PPK kepada masyarakat. Hubungan akan terjalin dengan baik jika dilakukan tidak hanya sekali tetapi dilakukan berkali-kali sejauh memungkinkan

b. Media cetak dan elektronika

Media cetak seperti majalah, surat kabar atau media elektronika seperti radio, televisi juga merupakan alternatif untuk menyampaikan informasi mengenai PPK pada masyarakat. Sebagian besar wilayah di Indonesia biasanya telah terjangkau oleh media-media tersebut, paling tidak di pusat kota Kecamatan dan sekitarnya. Namun demikian dapat pula membuat media cetak sendiri seperti : brosur, selebaran, buletin, spanduk dan lain-lain dengan tetap mengacu pada petunjuk-petunjuk resmi PPK

c. Papan informasi

Papan informasi merupakan media penyebarluasan informasi PPK yang diwajibkan keberadaannya untuk diletakkan di Kecamatan dan Desa. Penempatan papan informasi tidak hanya di dalam ruangan tetapi di ruang terbuka dan diletakkan di tempat-tempat umum yang biasa dikunjungi orang, seperti : pasar, balai desa, pos ojek, puskesmas, tempat ibadah dan lain-lain.

Berkenaan dengan kegiatan sosialisasi, menurut Ibu Mumpuni salah seorang FD, "Sosialisasi oleh FD biasanya dilakukan pada kelompok masyarakat baik ditingkat Desa maupun Dusun, jika memungkinkan fasilitatorpun hadir untuk memberikan pengarah dan bimbingan".²⁹

Berdasarkan penuturan salah seorang pokmas yang mengikuti program UEP (Usaha Ekonomi Produktif), sebut saja Ibu Mulyati yang menggeluti bidang jasa menjahit mengatakan, "Saya dapat informasi

²⁹ Hasil interview dengan Ibu Mumpuni salah seorang FD Desa Manyaran, pada tanggal 15 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

UEP bukan dari forum pengajian atau musyawarah tapi diberitahu dan ditawarkan dari FDnya".³⁰

Berdasarkan secara teknis sosialisasi tersebut sangat mudah dilakukan dalam masyarakat yang struktur kekeluargaan masih kuat melekat. Lain halnya jika terjadi dalam masyarakat yang individualis, misalnya saja di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan program PPK tidak hanya bagi lingkup pedesaan namun juga perkotaan. Berknaan dengan hal ini, Bapak Subagyo mengungkapkan, "PPK di perkotaan juga ada biasanya dinamakan P2KP (Program Pengembangan Kecamatan Perkotaan)."³¹ Dalam lingkup perkotaan sosialisasi tidak lagi efektif menggunakan cara-cara tradisional, katakanlah dari mulut ke mulut, meski hal ini memungkinkan terjadi. Dalam masyarakat pedesaan, frekuensi bertemunya satu dengan yang lain sangat sering, sehingga informasi dengan mudah tersebar. Namun disisi lain, cara penyampaian dengan sistim mulut ke mulut biasanya kurang bisa memahami secara mendalam mengenai konsep PPK secara utuh, maka sosialisasi yang efektif adalah dengan lisan maupun tulisan. Dari segi informasi (tulisan), hal ini secara tidak langsung membiasakan budaya membaca dikalangan masyarakat pedesaan, meski di pedesaan namun mayoritas masyarakat sudah bisa baca tulis.

³⁰ Hasil interview dengan Ibu Mulyati, salah seorang pokmas Dusun Surowangsan, pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

³¹ Hasil interview dengan Bapak Subagyo, selaku PJOK dalam PPK Kecamatan Karanggede, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor PJOK Kecamatan Karanggede.

D. Pembentukan Kelompok

Kelompok yang dimaksud adalah sekumpulan warga masyarakat (kelompok laki-laki, perempuan, atau campuran) yang tergabung dalam ikatan kemasyarakatan yang dapat berlatar belakang wilayah sama, kelompok-kelompok tersebut sudah ada sebelumnya³². Berkaitan dengan hal ini, Ibu Wiwik Widiastuti mengatakan, "Pembentukan kelompok berdasarkan syarat, minimal kelompok telah berjalan satu tahun, memiliki kepengurusan dan buku catatan seluruh kegiatannya".³³

Pembentukan kelompok ini ditujukan untuk memudahkan dalam pengelolaannya, terutama pada kelompok wanita sebagai peminjam dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) tiap kelompok biasanya dapat berjumlah banyak atau sedikit tergantung pada keinginan kelompok itu sendiri. Seperti telah dikemukakan, bahwa kegiatan kelompok harus telah berjalan atau sudah ada sebelumnya, dengan adanya integrasi kegiatan PPK. Dalam kegiatan masyarakat diharapkan mampu memperkuat jati diri dan kepercayaan diri masyarakat sehingga mendukung upaya-upaya pembangunan secara global. Pada kelompok pengajian misalnya dengan adanya UEP mampu meningkatkan rasa kekeluargaan, peningkatan kualitas spiritual dan meningkatnya kehidupan secara ekonomi.

³² Depdagri, *Penjelasan III: Forum-forum Musyawarah PPK*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002) hlm. 5.

³³ Hasil interview dengan Ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordinator Ekonomi Desa Manyaran pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

E. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan yang dilakukan adalah musyawarah yang didalamnya terdapat proses penggalian gagasan. Penggalian gagasan dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat setelah mendapatkan sosialisasi tentang PPK. Penggalian gagasan dapat dikelompokkan menjadi gagasan dari kelompok wanita dan gagasan kelompok campuran (pria dan wanita).

Musyawarah khusus perempuan dihadiri oleh perempuan saja. Hal ini dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi khusus dari musyawarah khusus perempuan tersebut adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Pembahasan dan penetapan usulan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan.
- b. Pembahasan dan penetapan usulan yang merupakan aspirasi perempuan di luar usulan kegiatan simpan pinjam.
- c. Memilih calon-calon wakil perempuan yang akan hadir dalam musyawarah antar desa.

Musyawarah desa kedua merupakan lanjutan dari musyawarah dari masing-masing kelompok dan pada tingkat dusun. Sebagaimana pernyataan Bapak Widodo:

"Musyawarah desa kedua merupakan forum pertemuan masyarakat untuk membahas kegiatan yang telah diusulkan pada tingkat kelompok dan tingkat dusun. Selanjutnya di tingkat Kecamatan dilakukan musyawarah antar desa yang bertujuan

³⁴ Depdagri, *Petunjuk Operasional PPK*, (Jakarta: Tim Koordinasi PPK, 2002), hlm. 19.

memilih usulan kegiatan dari masing-masing desa dengan melakukan perbandingan tiap usulan kegiatan. Usulan kegiatan yang mendapat peringkat pertama akan menjadi program kerja PPK. Sedangkan yang menduduki peringkat kedua secara otomatis akan menjadi program PPK pada periode berikutnya".³⁵

Setelah musyawarah desa kedua, dilakukan penulisan usulan desa.

Penulisan usulan merupakan kegiatan yang bertujuan menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah dimusyawarahkan pada musyawarah desa kedua dan musyawarah khusus perempuan serta disetujui menjadi usulan desa untuk diajukan pada musyawarah antar desa.³⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu

Wiwik Widiastuti menyatakan:

"Kegiatan musyawarah di tingkat desa biasanya biasanya dihadiri oleh pengurus masing-masing kelompok (SPP/UEP), tokoh masyarakat setempat, BPD, Pamong dan TPU. Sedangkan dalam musyawarah antar desa II (di Kecamatan), tiap desa mengirimkan 6 orang yang terdiri dari kades, ketua TPK, terkemuka dan 3 wakil dari perempuan. Mengenai usulan tingkat desa diajukan dalam bentuk proposal yang dilakukan oleh TPK".³⁷

Usulan kegiatan pada musyawarah antar desa kedua dinilai kemudian dilakukan pembuatan dan penyempurnaan desain proposal terhadap usulan oleh TPU (Tim Penulis Usulan) yang dibantu oleh Fasilitator Kecamatan, Fasilitator desa, Tim Pengelola Kegiatan dan masyarakat pengusul. Pada musyawarah desa ketiga akan dilakukan

³⁵ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku FK Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

³⁶ Depdagri, *Petunjuk Teknis Operasional PPK*, OP. Cit., hlm. 20.

³⁷ Hasil interview dengan Ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordianator Ekonomi Desa Manyaran, pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

sosialisasi mengenai alokasi dana PPK baik dilaksanakan di desa yang mendapatkan dana maupun yang tidak.

Hasil dari musyawarah antar desa ketiga disahkan oleh Camat atas nama Bupati menjadi Surat Penetapan Camat (SPC) yang berisi tentang daftar alokasi bantuan PPK di Kecamatan yang bersangkutan. Surat penetapan Camat berikut lampirannya, mencantumkan nama desa, jenis kegiatan termasuk jumlah alokasi dananya, dikirimkan oleh Penanggungjawab Operasional Kegiatan kepada PPK Kabupaten dengan tembusan pada Bupati, Fasilitator Kecamatan dan Konsultan Manajemen Kabupaten.³⁸

F. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan merupakan tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan antar desa, musyawarah desa dan berdasarkan hasil desain masing-masing kegiatan serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu diperhatikan hal-hal penting sebagai berikut.³⁹

- a. Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan pelaksanaan dan tanggungjawab ada ada masyarakat.
- b. Masyarakat desa mendapatkan prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin.
- c. Bila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga ahli dari luar sepanjang disepakati dalam musyawarah desa, dan kebutuhan ini sudah dimasukkan dalam usulan kegiatan.

³⁸ Depdagri, *Petunjuk Operasional PPK, Op. Cit.*, hlm.22.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

Berdasarkan hal-hal penting tersebut, maka pelaksanaan kegiatan dimaksudkan agar:

- a. Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
- b. Melibatkan kelompok sasaran terutama kelompok miskin.
- c. Menumbuhkan rasa memiliki pada masyarakat terhadap proses dan hasil-hasil kegiatan.

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan, hal penting yang perlu diperhatikan diantaranya pencairan dana. Mengenai hal ini Mbak Siti Supriatun mengatakan, "Keberadaan Koordinator Ekonomi (KE) di Desa merupakan tangan panjang UPK (Unit Pengelola Kegiatan) di Kecamatan, sebagai pihak yang akan menjembatani masalah dana antara UPK dan kelompok".⁴⁰ Lebih lanjut Bapak Widodo menegaskan, "Dana PPK merupakan milik rakyat kelompok harus rajin mengecek dana dan juga aktif dalam pertemuan kelompok sehingga mengetahui tiap info PPK dari Koordinator Ekonominya".⁴¹

G. Evaluasi

Evaluasi dalam PPK dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh desa-desa dan di tingkat antar desa, termasuk didalamnya adalah kinerja para pelaku PPK. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di desa maupun di kecamatan. Selain itu dapat juga dilihat dari isi laporan dengan berpegang pada rencana yang

⁴⁰ Sambutan Mbak Siti Supriatun di sela-sela pertemuan antar kelompok, selaku Sekretaris UPK Kecamatan Karanggede, pada tanggal 5 Februari 2005 di Desa Sempulur.

⁴¹ Sambutan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 5 Februari 2005 di Desa Sempulur.

ditentukan. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi.

Apabila dari hasil penilaian isi laporan dinyatakan terjadi penyimpangan dari rencana, maka dilakukan pengecekan ke lapangan melalui sumber yang dapat dipercaya.⁴²

Berkaitan dengan kegiatan evaluasi, Bapak Widodo menyatakan, "Proses pelaporan dan evaluasi dilakukan oleh masyarakat sendiri".⁴³ Lebih lanjut Bapak subagyo mengungkapkan, "Evaluasi sangat diperlukan untuk menangani berbagai hambatan dan kasus yang terjadi serta sebagai solusi klarifikasi terjadinya kesalahan informasi".⁴⁴

Evaluasi dimaksudkan sebagai upaya untuk melihat kembali proses dan pelaksanaan PPK dengan segala plus minusnya untuk memperbaiki pelaksanaan PPK ke depan.⁴⁵

2. Peningkatan Sumberdaya Wanita

Sumberdaya yang dimaksudkan adalah keikutsertaan dan partisipasi wanita dalam kegiatan PPK. Kegiatan ekonomi menjadi prioritas bagi kelompok wanita, hal ini sebagai langkah untuk memberikan kesempatan bagi wanita dalam upaya pembangunan melalui Program Pengembangan Kecamatan.

⁴² Depdagri, *Petunjuk Teknis Operasional PPK, Op. Cit.*, hlm.36.

⁴³ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 Februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

⁴⁴ Hasil interview dengan Bapak Subagyo, selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor PJAK Kecamatan Karanggede.

⁴⁵ Dokumen PPK Laporan Bulan Maret 2004, hlm. 3.

a. Ketentuan PPK fase II untuk meningkatkan partisipasi wanita, dapat dijabarkan sebagai berikut :⁴⁶

1. Sosialisasi PPK di Kecamatan (Musyawarah Antar Desa) I
Setiap desa diwakili 6 orang, paling sedikit 3 orang diantaranya perempuan. Forum harus menjelaskan pentingnya partisipasi perempuan, paling sedikit ada 1 perempuan dalam kepengurusan UPK.
2. Sosialisasi dan Pemilihan FD (Musdes) I
Dari 2 FD, 1 diantaranya perempuan, posisi pendamping lokal terbuka bagi laki-laki dan perempuan.
3. Pelatihan FD
FD perempuan harus dapat hadir dalam pelatihan, jadwal dan tempat pelatihan harus menyesuaikan dengan kegiatan FD perempuan.
4. Sosialisasi dan Penggalan Gagasan di Tingkat Dusun dan Kelompok
Jumlah dan jenis kelompok perempuan harus diidentifikasi, sosialisasi harus menggunakan metode atau teknik yang mampu membuat seluruh kaum perempuan mengetahui PPK dan memahami bahwa kelompok perempuan mempunyai hak yang sama dalam menentukan atau mengajukan usulan.
5. Penentuan Wakil dan Usulan Dari Perempuan (Musyawarah Khusus Perempuan)
Sebanyak mungkin perempuan hadir dalam Musyawarah Khusus Perempuan, terutama yang sebelumnya terlibat dalam penggalan gagasan di tingkat dusun dan kelompok. Penggalan gagasan dilakukan kelompok perempuan dilakukan secara terpisah dari kelompok laki-laki.
6. Penulisan Usulan
Perempuan harus dilibatkan dalam penulisan usulan, khususnya usulan dari perempuan.
7. Verifikasi Usulan
Perempuan harus dilibatkan dalam penulisan usulan, khususnya usulan dari perempuan.
8. Persiapan Kegiatan (Musyawarah Desa) III
Harus ada anggota perempuan dalam TPK dan Tim Pemantau. Hasil pertemuan harus dimengerti dan diketahui oleh kelompok Perempuan.
9. Pelaksanaan Kegiatan
Harus ada anggota perempuan dalam TPK. Perempuan harus diundang dalam penjelasan rencana pelaksanaan kegiatan.

⁴⁶ Dokumen Fasilitator Pemberdayaan Ekonomi, Ketentuan PPK Fase II Untuk Meningkatkan Partisipasi Perempuan.

Perempuan harus mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam pembangunan sarana dan prasarana, dan upahnya sama dengan laki-laki.

10. Penentuan Kegiatan

Harus ada anggota perempuan dalam Tim Pemantau dan Tim Pemeriksa. Perempuan harus diundang dalam pertemuan-pertemuan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan.

b. Kegiatan Ekonomi Produktif Wanita dalam PPK

Kegiatan ekonomi dalam Program Pengembangan Kecamatan terdiri dari UEP (Usaha Ekonomi Produktif) dan SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan). Dalam sub pokok bahasan tersebut, akan lebih dititikberatkan pada kegiatan UEP. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan kegiatan simpan pinjam yang diberikan kepada masyarakat miskin agar dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan ekonomi dengan syarat memiliki kegiatan usaha tertentu.

Berkaitan dengan kegiatan UEP, Bapak Sutiyono menyatakan, "Dengan UEP diharapkan akan mampu meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat miskin".⁴⁷ Dengan adanya stimulan dana dari UEP, masyarakat diarahkan untuk berdisiplin dan berfikir dengan konsep pemberdayaan, bahwasannya kondisi akan berubah jika mereka berusaha memanfaatkan peluang yang ada. Sedangkan menurut Bapak Setiyono:

"Perbedaan antara SPP dan UEP, SPP diberikan pada tiap-tiap desa sebanyak 10% pada setiap tahap periode dan tidak diharuskan memiliki kegiatan usaha untuk melakukan pinjaman dana, sedangkan pada kegiatan UEP bagi masyarakat

⁴⁷ Hasil interview dengan Bapak Sutiyono, selaku Penanggungjawab Administrasi Kegiatan dalam PPK, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor PJAK Kecamatan Karanggede.

peminjamnya diharuskan memiliki kegiatan usaha dan pergulirannya harus melalui usulan terlebih dahulu".⁴⁸

Berkenaan dengan kegiatan UEP, Ibu Wiwik Widiastuti mengatakan, "Kegiatan ekonomi kelompok wanita pada umumnya terdiri dari candakkulak, ketrampilan anyaman, jasa dan pedagang kelontong".⁴⁹ Kegiatan ekonomi dalam UEP adalah kelompok usaha kecil yang biasanya bersifat individu. Dalam kegiatan ekonomi, kelompok masyarakat diberikan kebebasan, namun dana pinjaman UEP harus dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan. Apabila dana UEP tidak dapat dikembalikan tepat waktu, maka pada periode berikutnya dapat dikenakan sanksi tidak menerima pinjaman dana dari PPK. Hal ini dilakukan karena kelompok tidak disiplin pada perjanjian dan dapat juga sebagai peringatan bagi kelompok lain agar tidak melakukan keterlambatan dalam pengembalian pinjaman.

Menurut Bapak Widodo, "UEP diberikan pada kelompok masyarakat dengan sistem tanggung renteng yaitu kelompok harus bertanggungjawab jika ada yang tidak membayar utangnya".⁵⁰ Jika dalam satu kelompok ada yang tidak membayarkan pinjamannya dan kelompoknya tidak melunasinya untuk dapat segera dikembalikan ke UPK, maka semua akan terkena sanksinya. Sebaliknya jika kelompok tepat waktu dalam pelunasan pinjamannya, maka kelompok akan

⁴⁸ Hasil interview dengan Bapak Setiyono, selaku Fasilitator Kecamatan Teknik dalam PPK, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor UPK Kecamatan Karanggede.

⁴⁹ Hasil interview dengan Ibu Wiwik Widiastuti, selaku Koordinator Ekonomi Desa Manyaran, pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

⁵⁰ Hasil interview dengan Bapak Widodo, selaku Fasilitator Pemberdayaan Ekonomi dalam PPK, pada tanggal 11 februari 2005 di Kecamatan Karanggede.

memperoleh bonus dari pinjamannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Ibu Mumpuni menyatakan, "IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu) akan diberikan pada kelompok dengan catatan tertib dalam pelunasan pinjaman selama 6 bulan berturut-turut".⁵¹

Kegiatan ekonomi yang dilakukan wanita meliputi kegiatan industri kecil atau industri rumah tangga, diantaranya kegiatan ekonomi yang dilakukan, misalnya Ibu Muflikhatun dengan toko kelontongnya sekaligus candak kulak. Dana pinjaman dari PPK melalui program pinjaman UEP (Usaha Ekonomi Produktif), bagi Ibu Muflikhatun digunakan sebagai tambahan modal usaha. Pinjaman untuk membeli barang-barang dagangan toko dan digunakan untuk membeli barang dagangan lokal untuk kemudian dijual lagi (candak kulak) ke pasar. Dengan barang-barang yang dijualnya lengkap jenisnya, maka pembeli selalu senang pergi berbelanja ke tokonya. Hal ini dikarenakan dengan ke toko Ibu muflikhatun dapat membeli barang lain tanpa harus ke toko lainnya lagi. Dengan dana UEP, barang dagangan semakin lengkap dan pembelinyapun meningkat, karena senang belanja ke tokonya. Kegiatan candak kulakpun dapat memberikan tambahan income baginya. Setiap hari pasaran wage dan legi (pasar Kecamatan Karanggede), pada pagi hari kira-kira pukul 05.30 sampai dengan pukul 06.00 melakukan "adang-adang"⁵²,

⁵¹ Hasil interview dengan Ibu Mumpuni, salah seorang Fasilitator Desa, pada tanggal 15 Februari 2005.

⁵² Adang-adang (bahasa Jawa) merupakan kegiatan menghadang atau menunggu penjual lokal setempat yang biasanya menjualnya dengan cara transaksi langsung untuk kemudian oleh

kemudian dengan angkutan pedesaan, barang dagangan dibawanya ke pasar Karanggede. Dengan modal yang diperolehnya dari PPK, Ibu Muflikhatun dapat membeli barang-barang lokal yang banyak untuk kemudian dijual lagi dan tentunya memperoleh tambahan keuntungan (laba). Melalui kegiatan ekonomi toko kelontongnya yang ramai karena banyak pembelinya dan kegiatan candak kulak yang menghasilkan laba, Ibu Muflikhatun dapat dengan mudah mengembalikan dana pinjaman UEP dan sebagian lagi untuk ditabung untuk keperluan sewaktu-waktu, kebetulan Ibu Muflikhatun sudah tidak menyekolahkan kedua anaknya karena kini mereka sudah bekerja sehingga berpenghasilan sendiri. Dari kegiatan ekonomi tersebut, Ibu Muflikhatun dulu menyekolahkan kedua anaknya.⁵³

Pokmas lainnya, misalnya saja Ibu Lilik Dewi yang melakukan kegiatan ekonominya sebagai pedagang makanan sekaligus membuat tempe dari bahan kedelai. Keseharian Ibu Lilik pada pasaran lokal pon dan kliwon pagi menjajakan makanan dipasar lokal (setempat). Barang dagangannya berupa gorengan, bubur sayur, “pelas”⁵⁴, dan masih banyak lagi lainnya. Di hari-hari lain, Ibu Lilik menjajakan barang dan makanan di rumahnya sambil membuat produksi tempe. Dana UEP yang diperolehnya dari PPK, dia gunakan untuk menambah

candak kulak dijual kembali ke pasar kecamatan yang relatif agak besar dan tentu saja harga jual akan lebih tinggi dari harga belinya. Barang-barang tersebut biasanya berupa beras, ayam, telur, hasil kebun dan masih banyak lagi lainnya.

⁵³ Hasil pengamatan kegiatan ekonomi Ibu Muflikhatun, salah seorang Pokmas Dusun surowangsan.

⁵⁴ Pelas merupakan makanan dari bahan kedelai yang dihaluskan dan dicampur parutan kelapa muda.

modal usahanya, diantaranya untuk membeli kedelai sebagai bahan utama untuk membuat “tempe”.⁵⁵ Selain itu dana UEP juga digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan yang dijualnya pada setiap hari pasaran lokal. Sejak perguliran dana pinjaman UEP, Ibu Lilik mampu meningkatkan produksi tempe. Hal tersebut terlihat dari jumlah (kuantitas) tempe yang disetorkannya ke toko-toko juga dari kualitas tempe yang diproduksinya, banyak orang mengatakan bahwa tempe produksi Ibu Lilik enak rasanya dibandingkan dengan lainnya. Adanya peningkatan secara kuantitas maupun kualitas produksi tempe tersebut, maka kegiatan ekonomi dalam hal ini penghasilan Ibu Lilik makin meningkat karena banyak peminat maupun pembeli produksi tempe tersebut. Dengan kondisi yang memungkinkannya untuk lebih berkembang dan meningkat pula penghasilannya, Ibu Lilik akan dengan mudah melunasi pinjaman dari UEP.⁵⁶

Lain halnya dengan kegiatan Ibu Kamsiyah yang membuat anyaman “keranjang”.⁵⁷ Bahan dasar keranjang yang terbuat dari bambu dapat dengan mudah didapatkan karena Ibu Kamsiyah telah memiliki tanaman tersebut di belakang rumahnya, sehingga Ibu Kamsiyah tidak perlu lagi membelinya. Dengan dibantu oleh suaminya, Ibu Kamsiyah melakukan rutinitas membuat kerajinan keranjang setiap harinya. Setiap seminggu sekali produksi

⁵⁵ Tempe merupakan bahan makanan dari kedelai yang diproses secara fermentasi.

⁵⁶ Hasil pengamatan kegiatan ekonomi Ibu Lilik Dewi, salah seorang Pokmas Dusun Surowangsan.

⁵⁷ Keranjang merupakan kerajinan dari bahan bambu yang dianyam.

keranjangnya ia jual ke pasar kecamatan Karanggede, bahkan ke daerah lain seperti pasar Salatiga atau pasar Boyolali. Harga anyaman keranjang bervariasi tergantung besar kecilnya, ada yang mencapai harga @ Rp. 30.000,-. Keberadaan dana pinjaman UEP dari PPK, ia gunakan untuk memasarkan barang kerajinannya ke daerah-daerah lain yang relatif agak jauh, hal ini dari segi pemasaran menguntungkan karena di pasar Kecamatan Karanggede sudah banyak saingannya. Setiap minggunya, Ibu Kamsiyah dapat menghasilkan 10 hingga 15 keranjang, kemudian ketika dianggap cukup, ia akan menjualnya ke pasar. Pemasaran ke daerah lain selain menguntungkan, akan tetapi agak kurang hemat dari segi keuangan karena membutuhkan biaya tambahan, jika ke pasar Karanggede hanya membutuhkan biaya transportasi Rp. 1.500,-. Apabila pemasarannya ke pasar Salatiga atau pasar Boyolali membutuhkan biaya transportasi sebesar Rp. 3.000,- belum termasuk biaya angkutan tergantung banyaknya barang. Namun, dengan pemasaran di daerah lain seperti pasar Salatiga ataupun pasar Boyolali barang kerajinan keranjangnya biasanya laku semua. Dengan adanya hal ini, maka biaya transportasi bukanlah hal yang besar untuk dipermasalahkan. Dengan kondisi tersebut, perekonomian Ibu Kamsiyah meningkat, sehingga dapat dengan mudah mengembalikan pinjaman UEP dari PPK.

3. Respon Masyarakat Terhadap PPK Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Produktif Wanita

Mengenai respon masyarakat yang dimaksudkan adalah tanggapan masyarakat terhadap upaya pemberdayaan wanita yang dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan. Masyarakat disini adalah baik yang mengikuti program maupun yang berkaitan dalam program tersebut. Selama PPK berjalan, kegiatan UEP telah berjalan dengan baik sesuai dengan usulan dari masyarakat. Pada bulan april 2004 tercatat ada 9 desa yang telah menerima perguliran dana UEP yaitu Manyaran, Sranten, Grogolan, Karangkepoh, Dologan, Klumpit, Pinggir, Tegalsari, Kebonan dengan total berjumlah 60 juta.⁵⁸

Dengan keberadaan dana dari PPK, maka masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pinjaman terutama, bagi masyarakat miskin. Berdasarkan pernyataan Bapak Subagyo, "Masyarakat sangat antusias terhadap keberadaan dana PPK dan banyak yang berharap dana dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk peningkatan ekonomi".⁵⁹ Sedangkan menurut Bapak Sutiyono, "Keberadaan dana dari PPK sangat membantu masyarakat, akan mampu melatih masyarakat untuk berfikir kritis. Pada kegiatan sarana prasarana masyarakat diharuskan berswadaya sebanyak 50% dari keseluruhan dana yang dihabiskan dalam program".⁶⁰

⁵⁸ Dokumen PPK Laporan Bulan April 2004, hlm. 1.

⁵⁹ Hasil interview dengan Bapak Subagyo, selaku Penanggungjawab Operasional Kegiatan dalam PPK, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor PJOK Kecamatan Karanggede.

⁶⁰ Hasil interview dengan Bapak Sutiyono, selaku Penanggungjawab Administrasi Kegiatan, pada tanggal 5 Februari 2005 di Kantor PJAK Kecamatan Karanggede.

Berdasarkan penuturan salah seorang Fasilitator Desa Manyaran, “Kegiatan simpan pinjam UEP di Desa Manyaran, selama beberapa tahap pelaksanaan dalam pengembaliannya termasuk selalu tepat waktu”.⁶¹ Hal ini berarti masyarakat semakin sadar dan mampu berdisiplin. Dengan adanya kebiasaan yang dikembangkan melalui PPK, masyarakat diharapkan dapat menerapkannya dalam semua bidang kehidupannya, baik di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Menurut pernyataan Ibu Suyani, “Saya senang mendapatkan pinjaman UEP, dapat digunakan untuk menambah modal usaha dan berharap periode berikutnya dapat memperoleh lagi”.⁶² Lain halnya dengan penuturan Ibu Mulyati, “Pinjaman UEP selain saya gunakan untuk tambahan modal juga untuk keperluan lainnya”.⁶³ Keperluan lain dalam hal ini dapat diartikan, jika usahanya bagus akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam kegiatan Ibu Mulyati yang merupakan seorang jasa penjahit, maka pinjaman modal dapat digunakan modal untuk membeli peralatan menjahit, membeli kain untuk dijual sekaligus mendapatkan jasa jahitan. PPK merupakan jalur alternatif bagi masyarakat yang sangat bermanfaat sekaligus memberikan peluang dan kesempatan masyarakat untuk dapat berkembang dengan bertumpu pada prinsip-prinsip pemberdayaan. Seiring dengan adanya PPK, sebenarnya dalam lingkup Kecamatan Karanggede

⁶¹ Hasil interview dengan Ibu Mumpuni seorang FD Desa manyaran, pada tanggal 15 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

⁶² Hasil interview dengan Ibu Suyani, salah seorang pokmas, pada tanggal 15 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

⁶³ Hasil interview dengan ibu Mulyati, salah seorang pokmas, pada tanggal 16 Februari 2005 di Dusun Surowangsan.

telah berjalan program lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Berkenaan dengan hal ini Bapak Fauzan AR menyatakan:

“Sebelum ada PPK di Kecamatan Karanggede telah ada program bagi masyarakat miskin diantaranya; program sejuta bebek, program gaduhan sapi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Program tersebut dikelola oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan. Kaitannya dengan PPK, diharapkan berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat saling melengkapi sehingga benar-benar terealisasi di masyarakat”.⁶⁴

Keberadaan beberapa program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, membuktikan bahwa sebenarnya pemerintah sangat peduli akan kondisi masyarakatnya, kini keputusan telah berada di tangan masyarakat sendiri. Apabila mereka memiliki kesadaran dan keinginan untuk maju dan berkembang, maka program-program dari pemerintah akan menjadi peluang emas guna memperbaiki kondisi kehidupannya.

4. Analisis Hasil Penelitian

Pinjaman Usaha Ekonomi Produktif sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok wanita yang tergolong miskin. Wanita sebagai salah satu prioritas dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), akan memberikan akses terhadap berbagai kegiatan ekonominya. Pada umumnya bidang kegiatan ekonomi yang dijalankan wanita melalui PPK yaitu produksi rumah tangga atau yang sering disebut dengan kelompok usaha kecil. Hal tersebut disebabkan kegiatan ekonomi produksi hanya dalam ruang lingkup yang kecil yaitu keluarga.

⁶⁴ Hasil interview dengan Bapak Fauzan AR, selaku Sekretaris Kecamatan mewakili Camat Karanggede, pada tanggal 17 Februari 2005 di Kantor Sekcam Kecamatan Karanggede.

PPK yang berintikan pada pemberdayaan lebih mengarah pada pola *bottom up*⁶⁵ dan mulai menghilangkan pola-pola *top down*. Pola pembangunan yang bersifat *bottom up* sangat menguntungkan masyarakat, hal ini karena mampu menumbuhkan berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Pemberdayaan melalui PPK pada hakikatnya ditujukan bagi masyarakat miskin dan sebagai pengembangan konsep PPK yang diarahkan pada penyelenggaraan pemerintah (birokrasi) yang baik. Pola *bottom up* yang dikembangkan melalui PPK merupakan langkah yang baik bagi proses pembangunan yang berbasis pada masyarakat sebagai penggagas dan pelaksananya.

Langkah-langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh pelaku PPK yaitu dengan menetapkan dan memberlakukan berbagai kebijakan dan adanya upaya peningkatan sumberdaya wanita. Kebijakan PPK tersebut terdiri dari; pelatihan pelaku PPK, pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat jika memang diusulkan, sosialisasi, pembentukan kelompok, ketentuan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Sedangkan upaya peningkatan sumberdaya wanita berupa ketentuan mengenai partisipasi wanita dalam PPK dan kegiatan simpan pinjam UEP (Usaha Ekonomi Produktif). Adanya kegiatan musyawarah dalam tahap perencanaan program secara tidak langsung akan mendidik dan membiasakan masyarakat desa untuk selalu mengadakan musyawarah dalam setiap kepentingan yang berkenaan untuk kepentingan bersama.

⁶⁵ Bottom up merupakan istilah dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang berarti sistem kebijakan pemerintah beserta birokrasinya yang bertindak sebagai fasilitator semata, sedangkan masyarakat berhak memberikan aspirasinya dalam rangka pembangunan.

Kegiatan evaluasi dalam tahap akhir PPK dilakukan untuk menelaah kembali program yang telah berjalan, dimana letak kelebihan dan kelemahannya, agar pelaksanaan pada tahap berikutnya berjalan lebih lancar. Dalam evaluasi, masyarakat juga memiliki peran, jika di lapangan pelaksanaan program terjadi penyelewengan, maka masyarakat berhak untuk mengajukan pengajuan masalah melalui pelaku PPK. Hak pengaduan masalah oleh masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan PPK merupakan wujud kontrol sosial atau pengawasan oleh masyarakat.

Dalam setiap tahap kegiatan PPK, masyarakat berperan aktif dan menyambut program dengan antusias. Terbukti dengan terealisasinya program sarana prasarana jalan di beberapa desa, demikian pula dengan kegiatan UEP. Dengan adanya kegiatan simpan pinjam bagi wanita, kegiatan ekonomi wanita makin membaik, hal ini dikarenakan adanya suntikan modal dari PPK. Hal yang benar-benar perlu diperhatikan dan dianalisis mengenai masyarakat miskin, apakah penerima benar dari golongan miskin dan apakah dana tepat pada sasaran. Dengan hal ini, maka pelaku PPK dan masyarakat harus bekerjasama sehingga ada pengawasan. Kesuksesan program harus didukung transparansi birokrasi dan masyarakat, jadi diantara keduanya harus ada unsur balance (keseimbangan).

Pada kegiatan UEP di lapangan, ditemukan kegiatan simpan pinjam tersebut ada pada kelompok pengajian. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat yang dulunya tidak aktif mengikuti pengajian menjadi aktif.

Hal ini berarti program dari PPK menjadi stimulan bagi warga masyarakat untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonominya dan secara tidak langsung kehidupan kerohaniahannya.

Respon masyarakat terhadap keikutsertaan wanita dalam Program Pengembangan Kecamatan sangat antusias dan menyambut baik keberadaannya. Berbagai tanggapan masyarakat, baik yang mengikuti program atau yang berkaitan dengan program, memberikan persepsi yang sama bahwa program tersebut sangat bermanfaat dan membantu proses kemandirian wanita dalam segi pengembangan potensi yang dimiliki dan kegiatan ekonominya dengan dana PPK yang telah digulirkan. Bahkan, masyarakat berharap program tersebut terus berjalan guna menunjang kemandirian pada diri wanita serta mampu mewujudkan wawasan *women in development*.

Kegiatan ekonomi melalui UEP memberikan kesempatan bagi wanita yang ingin mengembangkan ekonominya, kegiatan ini akan menimbulkan keswadayaan dan kemandirian. Hal yang mungkin perlu dikembangkan oleh para pelaku PPK, kegiatan ekonomi masyarakat sangat memerlukan pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan manajemen, mitra usaha pemasaran atau bahkan pemagangan. Hal ini sebagai wujud pemberdayaan yang mengarah pada suatu kemandirian. Hal lain yang perlu dikembangkan, PPK perlu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga lain untuk mengembangkan kegiatannya. PPK akan mampu memperbaiki bidang sosial budaya,

